

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya peningkatan dari PKB Rp.21.942.788.635 ke PKB Rp.25.520.137.911 atau sebesar 16,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. Jadi menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bima berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada di Daerah Kota Bima.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Bappenda UPTB PPD Raba Bima terdapat beberapa faktor yaitu, faktor kesadaran masyarakat dan Tingkat penghasilan atau pendapatan Masyarakat. Sedangkan mengacu pada teori Suprison (2016) ada tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor sumber daya aparatur, faktor kesadaran Masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana.
3. Strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yakni,
 - a. Sosialisasi dengan masyarakat
 - b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
 - c. Pemberian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor
 - d. Inovasi-inovasi layanan unggulan

5.2 Saran

1. Pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima agar lebih gencar mensosialisasikan lagi kepada masyarakat kepada wajib pajak terkait inovasi yang dilakukan. Bias dengan memasang spanduk didekat mobil samsat keliling serta kantor samsat maupun di Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) mengenai inovasi pembayaran pajak kendaraan sudah bisa dilakukan dari rumah atau secara online. Karena sangat di sayangkan inovasi sudah seinovatif itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
2. Masyarakat Kota Bima harus mengutamakan dan mematuhi pembayaran pajak, karena itu tanggung jawab kita sebagai wajib pajak. Ini akan memungkinkan kita untuk merangkul dan memanfaatkan teknologi modern, informasi, dan komunikasi dalam tugas kita sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah khususnya Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima dapat secara efektif mengimplementasikan inovasi layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, Hikmah, Dewi Fitriyani, and Susfayetti Susfayetti. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jambi." *Jambi Accounting Review (JAR)* 1(1): 63–79.
- Betasoni, and Gesang Kurnia. 2018. *Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Di Kabupaten Ponorogo*.
- Irsan, Muhammad. 2022. "Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor." *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1(2): 267–72.
- Karina, Nurul, and Budiartono Novi. 2016. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo." *Jurnal EMBA* 4(1): 715–22.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi Publisher. Yogyakarta. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Marta, A., & Suprison, S. (2016). *Efektivitas Pelayanan Pemerintah terhadap Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Meifari, Vanisa. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Tanjungpinang." *Cash* 3(01): 39–51.
- Mery, Irvada, Kartika Putri, Rissa Eka, and Aprillia Saputri. 2023. "Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor." 2(2): 98–105.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Nirzawan. (2001). *Tinjauan Umum Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah Dan Pembangunan Daerah.

Republik indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Sari, R.A. Vivi Yulian, and Neri Susanti. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 2(1): 63–78.

Siagian, Sondang. 2002. *kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo dan B Ilyas, W. (2003). *Perpajakan Indonesia, buku 1 Edisi 10*. . Jakarta: Salemba Empat.

Widyaningsih, Aristanti. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung

Worumi, Hendrik. 2019. "Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 6(3): 23–39.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor? Apakah wajib pajak menjadi salah satu faktor penghambat?
2. Apa strategi yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana strategi dan upaya UPTB PPD Raba Bima dalam mensosialisasikan pajak kendaraan bermotor kepada Masyarakat?
4. Bagaimana Kerjasama dengan institusi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah ada keringanan untuk para pelaku wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah ada program atau insentif khusus yang ditawarkan kepada wajib pajak agar mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
7. Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima dari Tahun sebelumnya ke Tahun 2022?
8. Apa ada syarat tertentu ketika ada salah satu wajib pajak yang hendak akan melakukan pembayaran pajak melalui samsat keliling?
9. Bagaimana menurut Bapak dengan adanya program-program yang sudah diimplementasikan oleh UPTB PPD Raba Bima dalam upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi



Aktivitas wawancara dengan Bapak Drs. Aidin selaku kepala UPTB PPD Raba Bima

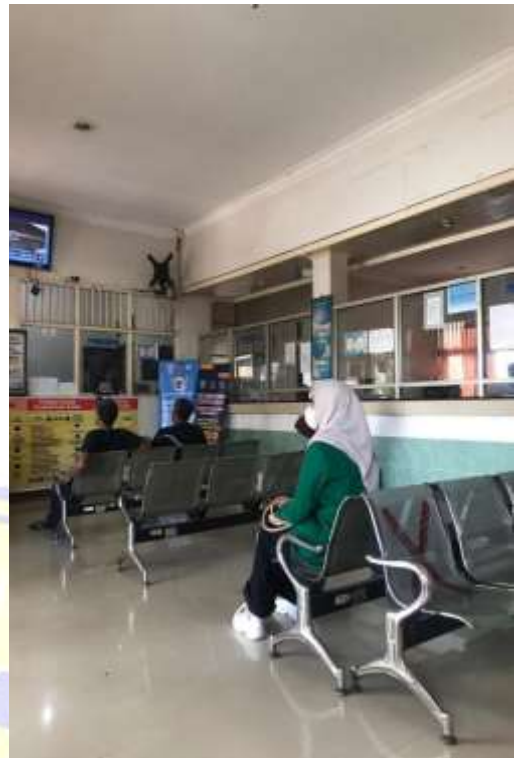




Pengambilan data sekaligus wawancara Bersama Bapak Ikhwan S.Sos selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB PPD Raba Bima



Wawancara dengan salah satu staf UPTB PPD Raba Bima



Aktivitas di Kantor Bappenda UPTB PPD Raba Bima dan wawancara Bersama salah satu pelaku wajib pajak

